

BAB III

GAMBARAN UMUM HUBUNGAN INDONESIA - ISRAEL

A. Gambaran singkat Israel

Negara yang kini disebut sebagai “Negara Yahudi” (*The Jewish State*) Israel, sebenarnya dibangun diatas wilayah Palestina, dengan cara-cara teror dan konspirasi Internasional.³⁹ Israel begitu banyak mendapat sorotan dunia karena banyak melakukatan penjajahan, kejahatan dan terorisme yang dijalankannya terhadap warga palestina.

Israel adalah sebuah Negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Libanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula oleh dua daerah Otoritas Nasional Palestina, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Populasi penduduk sebesar 7,28 juta jiwa dan merupakan satu-satunya Negara Yahudi di dunia. Selain itu, terdapat pula kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi etnis Arab berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaritan dan lainnya.⁴⁰

Berdirinya Negara Israel diawali dari Resolusi Majelis Umum PBB yang ditetapkan pada 29 November 1947 yangyang berisi pemisahan wilayah palestina menjadi dua. Resolusi ini kemudian dikenal sebagai resolusi 181. Resolusi ini keluar atas tekanan pemerintahan Truman terhadap sejumlah Negara anggota

³⁹ Adian Husaini, *Pragmatisme Dalam Politik Zionis Israel*, Penerbit Khairul Bayaan, 2004, hal. 1.

⁴⁰ www.wikipedia.org/wiki/israel

PBB. Pemungutan suara di majelis umum PBB menghasilkan 33 suara setuju, 13 suara menolak, 10 suara abstain dan 1 absen. Uni Sovyet juga mendukung resolusi ini. Tetapi Inggris yang ketika itu masih memegang mandate PBB atas Palestina tidak mendukung pemisahan Palestina, disebabkan tekanan dari Negara-negara Arab.⁴¹

Israel tidak menyalahgunakan kesempatan yang diperoleh berdasarkan resolusi 181 yang diberikan PBB kepada Israel, hingga kemudian pada 14 Mei 1948 Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Tindakan Israel ini kemudian diikuti munculnya penolakan dari Negara-negara Arab hingga menyebabkan serangkaian peperangan dan konflik di Timur Tengah.

B. Perkembangan Politik Luar Negeri Israel

Pengamat politik Roy R. Anderson membagi politik luar negeri Israel dalam tiga periode yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Israel. Periode **pertama** (1945-1948), pada periode ini Israel masih memusatkan perhatiannya terhadap berdirinya negara Israel, upaya perolehan pengakuan internasional baik secara *de jure* maupun *de facto* melalui serangkaian diplomasi Israel terhadap dunia internasional, khususnya dari PBB dan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Dalam hal ini Israel benar-benar sukses. Negara-negara besar dengan suara bulat mengakui keabsahan negara Israel. Dukungan

⁴¹ Riza Sihbudi, *Profil-profil Negara Timur Tengah*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995. Hal. 20

luas terhadap Israel terkait meluas di Amerika Serikat, Israel juga menerima bantuan besar dalam bentuk dukungan politik dan keuangan dari Komunitas Yahudi Amerika (*American Jewish Community*). Pada periode ini merebak gerakan “anti-semit” atau “fasis” sebagai bentuk kritik atau kecaman terhadap segala bentuk dukungan kepada Israel.

Pada **periode kedua** (1948-1974), politik luar negeri Israel terkait erat dengan kebijakan politik dalam negerinya. Pembangunan dalam negeri tergantung kepada jaminan keamanan perbatasan negara. Dimasa ini, Israel secara penuh masuk ke dalam aliansi bipolar. Bantuan dan senjata Amerika Serikat mengalir bebas ke Israel sejak berdirinya negara ini pada tahun 1948 sampai pada periode III, dimana Amerika Serikat meninjau kembali hubungannya dengan Israel. Terhadap negara-negara Arab tetangganya, Israel menerapkan “*carrot and stick*” policy. “Carrot” atau wortel diberikan kepada negara-negara tetangganya yang mau bernegosiasi atau bekerjasama atau dengan kata lain mau memberikan keuntungan dalam berhubungan dengan Israel. Sedangkan “stick” atau tongkat adalah simbol bahwa Israel superior dalam bidang militer dengan bantuan Amerika. Pada periode ini pula dengan menganut strategi “pertahanan terbaik adalah serangan yang baik” maka Israel memasuki medan Perang Suez tahun 1956 dan Perang tahun 1967. Namun aksi-aksi militer Israel pada peperangan ini jelas membawa dampak ekonomi yang tinggi bagi pemerintah Israel.

Pada **periode ketiga** (1974 dan seterusnya), Israel bersikap lebih pragmatis terhadap semua bentuk kebijakan luar negerinya, hal ini sejalan dengan ketergantungan Amerika Serikat yang semakin tinggi terhadap minyak Timur Tengah dan tersudutnya posisi Israel di dunia internasional. Dalam perang tahun 1973, Presiden Nixon secara terbuka mengirimkan senjata ke Israel dan memberikan bantuan sebesar 2,2 milyar USD pada 19 Oktober 1973. Nixon telah mengabaikan permintaan Saudi agar AS tidak beralih dalam perang tersebut. Embargo minyak Saudi terhadap Amerika Serikat melumpuhkan Amerika Serikat. Sehingga Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger mengakui telah berbuat kesalahan.⁴²

Jika melihat tiga periode yang melatar belakangi kebijakan luar negeri Israel diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan nasional Israel jelas menekankan pada aspek tercapainya keamanan Israel yang hakiki, sehingga penyelesaian damai antara Israel dan Palestina akan terwujud tanpa harus mengambil resiko tinggi yang membahayakan keamanan Israel, dengan landasan *peace for security*.

Menurut Michael Brecher ada dua tujuan pokok kebijakan politik luar negeri Israel, (1) pemeliharaan pertahanan militer secara efektif, pencegahan perang merupakan hal yang penting dibandingkan dengan kemenangan akan

⁴² Roy R. Anderson, (et. Al), *Politics and Change in The Middle East: Sources of Conflict and Accomodation*, 2nd edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc. New Jersey, 1987, dalam buku Riza Sihbudi, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, (Jakarta: Dunia Pustaka jaya, 1997), h. 120

perang, (2) hubungan baik dengan berbagai negara atau melakukan pendekatan dengan dunia internasional agar dapat melemahkan kebencian negara-negara Arab dan akhirnya membuka jalan proses perdamaian antar kedua negara.⁴³

C. Konflik Israel-Palestina

Menurut Prof. Dr. Juwono Sudarsono terdapat dua masalah esensial di Timur Tengah, yaitu masalah Arab-Israel yang belum tentu berkaitan dengan masalah Palestina dan apa yang disebut sebagai inti masalah Timur Tengah yaitu masalah Palestina – Israel. Ini berarti bahwa kalau membahas masalah dan proyek konperensi internasional mengenai Timur Tengah yang harus diingat bahwa ada masalah Arab- Israel tersendiri, yang lepas dari masalah Palestina dan ada masalah Israel-Palestina yang merupakan inti persoalan seperti yang sering dikemukakan dalam forum Diplomasi.⁴⁴

Konflik Israel-Palestina, sebenarnya bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas, yaitu konflik yang berlanjut antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel memiliki satu pandangan yang

⁴³ Michael Brecher, *The Foreign Policy System of Israel*, Oxford university press, London, 1972. hal. 286

⁴⁴ Bantarto Bandoro Editor. Juwono Sudarsono. *Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*. Hal. 43-44

sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Perang Arab-Israel 1948, memunculkan berbagai permasalahan seperti pengungsi. Ditambah lagi dengan masalah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur diakibatkan dari Perang Enam Hari pada 1967. Selama ini telah terjadi konflik yang penuh kekerasan, dengan berbagai tingkat intensitasnya dan konflik gagasan, tujuan, dan prinsip-prinsip yang berada di balik semuanya. Pada kedua belah pihak, pada berbagai kesempatan, telah muncul kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dalam berbagai tingkatannya tentang penganjuran atau penggunaan taktik-taktik kekerasan, anti kekerasan yang aktif, dll.

Ada pula orang-orang yang bersimpati dengan tujuan-tujuan dari pihak yang satu atau yang lainnya, walaupun itu tidak berarti mereka merangkul taktik-taktik yang telah digunakan demi tujuan-tujuan itu. Lebih jauh, ada pula orang-orang yang merangkul sekurang-kurangnya sebagian dari tujuan-tujuan dari kedua belah pihak. Dan menyebutkan "kedua belah" pihak itu sendiri adalah suatu penyederhanaan: Al-Fatah dan Hamas saling berbeda pendapat

tentang tujuan-tujuan bagi bangsa Palestina. Hal yang sama dapat digunakan tentang berbagai partai politik Israel, meskipun misalnya pembicaraannya dibatasi pada partai-partai Yahudi Israel.

Mengingat pembatasan-pembatasan di atas, setiap gambaran ringkas mengenai sifat konflik ini pasti akan sangat sepihak. Itu berarti, adanya penganjuran perlawanan Palestina dengan kekerasan biasanya membenarkannya sebagai perlawanan yang sah terhadap pendudukan militer oleh bangsa Israel yang tidak sah atas Palestina, yang didukung oleh bantuan militer dan diplomatic oleh Amerika Serikat. Banyak yang cenderung memandang perlawanan bersenjata Palestina di lingkungan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai hak yang diberikan oleh persetujuan Jenewa dan Piagam PBB. Sebagian memperluas pandangan ini untuk membenarkan serangan-serangan, yang seringkali dilakukan terhadap warga sipil, di wilayah Israel itu sendiri.

Perseteruan antara Israel dan Palestina tentu memberikan dampak terhadap politik dalam negeri masing-masing Negara. Suatu contoh, partai Likud ingin menyelesaikan intifadah dengan kekerasan, dengan alasan mengusir seluruh pemimpin intifadah dari daerah penduduk sehingga tidak ada lagi wilayah perang Palestina karena pemimpinnya tidak ada.

Pemimpin Likud Yitzhak Shamir mengatakan “Apabila Negara Palestina didirikan di daerah penduduk niscaya akan menyebabkan perang dunia ketiga”⁴⁵

Hingga pada tahun 2000-an, konflik palestina-israel ini terus berlanjut hingga terjadi agresi militer Israel pada tahun 2008 yang menjadikan Gaza sebagai wilayah operasinya. Konflik yang berkepanjangan ini bahkan menyebabkan banyak kecaman dari Negara-negara didunia terutama saat insiden “Mavi Marmara” yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2010.

Konflik ini sempat mereda, namun eskalasi konflik kembali dimulai pada tahun 2014 setelah terjadi serangkaian peristiwa. Peristiwa-peristiwa ini mencakup berlanjutnya pemblokiran Jalur Gaza oleh pemerintah Mesir dan Israel, berlanjutnya serangan roket dari Gaza, gagalnya diskusi perdamaian yang disponsori Amerika Serikat, upaya pembentukan pemerintahan koalisi oleh faksi-faksi bersaing di Palestina, penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel, penculikan dan pembunuhan seorang remaja Palestina, penangkapan hampir seluruh pemimpin Hamas di Tepi Barat oleh Israel, dan meningkatnya serangan roket ke Israel setelah perjanjian pencabutan blokade Gaza secara bertahap tidak dipenuhi karena Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya. Pada malam tanggal 6 Juli, serangan udara Israel di Gaza menewaskan tujuh militan Hamas, sementara Hamas meningkatkan serangan roketnya ke Israel dan

⁴⁵ The Jakarta Post, 19 Oktober 1988.

menyatakan bahwa "seluruh warga Israel" merupakan "target yang sah". Pada tanggal 8 Juli 2014, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan *Operation Protective Edge* di Jalur Gaza.⁴⁶

D. Kepentingan Israel terhadap Indonesia

Secara politik Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis di mata Israel. Dalam konteks Asia Tenggara, Kedutaan Besar (kedubes) Israel di Singapura bahkan dikatakan merangkap sebagai “Kedutaan Besar Israel untuk Indonesia”. Israel merupakan mitra strategis dan basis Israel di Asia Tenggara. Jika ada persoalan yang menyangkut antara Indonesia dengan Israel, biasanya secara *official* dikomunikasikan melalui Singapura yang aman secara politik.

Di mata Tel Aviv, menjadi seorang Dubes Israel yang bertugas di Singapura memiliki tantangan tersendiri berupa “peran ganda” yang harus dimainkan secara apik. Dalam hal ini, di samping meningkatkan hubungan Israel-Singapura, namun yang lebih penting bagi seorang dubes Israel di Singapura adalah membuka kontak Tel Aviv-Jakarta. Sehingga, para diplomat Israel di Singapura selalu berusaha mengunjungi Jakarta, pada umumnya dilakukan secara rahasia untuk menghindari ekspos media masa dan resistensi masyarakat domestik Indonesia. Sensitifitas publik Indonesia terhadap Israel merupakan catatan penting bagi diplomat maupun aktivis Israel yang beroperasi di Singapura sehingga sangat

⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel%E2%80%93Gaza_2014

penting bagi mereka untuk menemui tokoh-tokoh kunci pemegang opini publik di Indonesia agar bisa diarahkan untuk berorientasi pro-Israel.

Dubes Israel untuk Singapura semakin intensif mengunjungi Jakarta pada masa transisi politik Indonesia menuju reformasi, untuk memonitor mengenai dinamika perkembangan politik nasional Indonesia. Bahkan di era SBY, dubes Israel untuk Singapura, Amira Arnon, secara “diam-diam” mengunjungi Indonesia. Kabar mengejutkan muncul setelah seorang pejabat tinggi Israel bisa masuk ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Pejabat itu adalah Duta Besar Israel untuk Singapura, Amira Arnon. Seorang diplomat asing di Jakarta mengungkapkan, Amira Arnon berkunjung ke Jakarta selama sepekan pada 20-27 Maret 2011 lalu. “Ia datang menawarkan teknologi pertanian terbaru,” kata sang diplomat yang menolak disebutkan identitasnya kepada *Tempo* di kantornya, Kamis, 7 Juli 2011.⁴⁷

Dalam pandangan para Analis politik Israel, posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara sangat strategis karena dianggap sebagai negara kunci dan negara besar secara demografis, potensi sumber daya alam yang melimpah dan juga negara berbasis Islam terbesar di Asia Tenggara bahkan di dunia. Dalam logika politik Israel, jika Indonesia berhasil ditaklukan secara politik melalui pembukaan

⁴⁷ <http://www.tempo.co/read/news/2011/07/08/078345512/Duta-Besar-Israel-di-Singapura-Diam-Diam-Melawat-ke-Jakarta>

hubungan diplomatik, dengan pengaruh efek politik domino di Asia Tenggara, maka Malaysia dan Brunei (dua negara ASEAN yang belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel) sangat besar kemungkinannya untuk ikut, dimana negara-negara tersebut pada tataran sosio-kultural dan dimensi religiusitas bisa dikatakan hampir sama.

Kepentingan politik Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia sangat besar dampaknya strategisnya bagi pencitraan politik Israel. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai arti yang sangat penting bagi politik Israel di dunia Islam. Dalam konteks ini, jika kontak Jakarta-Tel Aviv bisa diwujudkan, maka diharapkan negara-negara berbasis Islam lainnya akan segera mengakhiri resistensi mereka terhadap Israel. Bagi Israel, memulihkan hubungan dengan dunia Islam sangat penting, antara lain, guna menghadapi radikalisme kelompok Islam Fundamentalis seperti gerakan Intifadha di bawah komando Hamas (gerakan perlawanan Islam) dan Jihad Islam Palestina di Gaza dan Tepi Barat, yang dikenal sangat militan dan berada di garda terdepan dalam melawan Zionis Israel.

Posisi Indonesia di organisasi regional maupun internasional seperti OKI (organisasi konferensi Islam) dan GNB (gerakan non-blok) sangat strategis, dimana organisasi tersebut sangat terkait dengan kepentingan negara-negara yang masuk dalam blok dunia Islam dan negara-negara dunia ketiga. Bagi Israel, dengan posisi tersebut Indonesia diharapkan bisa mempengaruhi, tidak hanya

negara-negara Islam, melainkan juga negara-negara dunia ketiga pada umumnya, yang selama ini memang masih ada semacam *gap* psikologis untuk membangun kontak dengan Tel Aviv. Tampaknya menjalin hubungan diplomatik dengan RRC, India dan sejumlah negara-negara Arab-Islam seperti Mesir, Yordania, Turki belum cukup bagi Israel. Akses ke dunia ketiga dan dunia Islam diharapkan akan semakin meluas seandainya Indonesia pun bisa dirangkul. Posisi Indonesia yang begitu penting bagi Israel karena corak keIslamannya yang moderat, modernis dan pro-demokrasi serta dianggap sebagai pemimpin bagi dunia ketiga.

Kawasan Asia tenggara merupakan daerah yang dibidik oleh strategi Zionis Yahudi karena termasuk salah satu kawasan yang sangat strategis disebut oleh Nicholas Spykman sebagai 'daerah pinggiran' dalam teori daerah pinggiran (*Rimland of Asia*), terutama negara kepulauan Indonesia.⁴⁸ Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara secara demografis, letak geografis yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah, maka Indonesia menjadi sasaran target Israel. Dengan kata lain, jika negara sebesar Indonesia bisa dikuasai maka dengan sendirinya Asia Tenggara dapat dikuasai.

Secara geo-politik internasional, Israel dan negeri paman sam (AS) ingin merangkul dan menguasai Indonesia sebagai negara besar dan penting di kawasan Asia Pasifik agar dijadikan sebagai sekutu untuk menghadang dominasi kekuatan

⁴⁸ Wibowo, M. Operasi Intelijen dan Spionase Yahudi Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Solomon. 2009. hal. 73

politik-militer RRC yang ingin menguasai kawasan tersebut. Tampaknya Zionis Israel dan AS sangat khawatir jika Indonesia dekat dan masuk dalam poros RRC. Dengan pendekatan politik, diharapkan Indonesia bisa dirangkul dalam peta pertarungan kepentingan strategis di kawasan Asia Pasifik.

Kepentingan Israel terhadap Indonesia di bidang politik terkait juga dengan kondisi dalam negeri Israel sendiri. Secara ekonomi-politik, Israel sejak dini harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi dalam negeri dan instabilitas politik akibat friksi-friksi yang ada dalam peta politik Israel. Di sisi lain, krisis ekonomi global yang telah melanda AS membuat Israel tidak mungkin terus-menerus mengandalkan bantuan ekonomi dari *big brother* atau sekutu utamanya itu (sekitar 11 milyar dolar pertahunnya). Belum lagi anggaran belanja militer yang begitu besar untuk membiayai perang terbuka dengan kelompok garis keras Palestina. Secara demografis, komposisi penduduk Israel terbelah menjadi dua fungsi, yaitu fungsi sipil dan fungsi pertahanan. Hal inilah yang mendorong Tel Aviv untuk berusaha mengakhiri isolasi internasionalnya dan marjinalisasi kulturalnya, terutama di kalangan negara-negara dunia ketiga.

E. Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia-Israel

Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar

negara berkembang, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.⁴⁹ Substansi konstitusi tersebut menunjukkan, bahwa dalam hal kebijakan politik luar negeri Indonesia harus berbasis pada semangat dan nilai-nilai kemerdekaan serta anti-kolonialisme, berorientasi pada kepentingan nasional dan mandiri dalam arti tidak terkooptasi atau diintervensi oleh negara-negara tertentu maupun hegemoni kekuatan-kekuatan asing. Dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Israel, pijakan konstitusional tersebut menjadi basis legal-formal dalam tataran implementasi kebijakan di lingkungan pergaulan internasional.

Penolakan berbagai elemen di tanah air terhadap upaya pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel berdasarkan penafsiran terhadap konstitusi yang ada. Dalam konstitusi yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada alinea pertama, dikatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Mengacu pada isi konstitusi tersebut, sulit kiranya bagi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini disebabkan karena pengarus-utamaan opini publik global terhadap fakta politik yang ada terkait

⁴⁹ Kerangkin Syahmam, Ak, *Op.cit*, hal. 237

dengan penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Sehingga kalau Indonesia membuka hubungan dengan Israel, dianggap sama saja dengan menjustifikasi dan melegitimasi penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina, maka secara otomatis merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional.

Hal yang sama juga selaras dengan peraturan Pemerintah pada tahun 1967, dijelaskan bahwa Indonesia pada dasarnya boleh melakukan hubungan dagang dengan negara mana saja, kecuali dengan lima negara yakni Afrika Selatan, Republik Rakyat China, Taiwan, Zimbabwe, dan Israel. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, larangan hubungan dagang maupun diplomatik dengan empat negara yakni Afrika Selatan, Republik Rakyat China, Taiwan, dan Zimbabwe dicabut sehingga pengusaha Indonesia dapat melakukan hubungan dagang dengan empat negara itu. Khusus dengan Israel hingga kini larangan untuk membuka hubungan tetap berlaku.

Masalah hubungan Indonesia-Israel sebenarnya sudah menjadi salah satu wacana publik dan perdebatan yang cukup hangat dalam ruang atmosfer intelektual maupun arena perpolitikan Indonesia. Di pihak Israel, obsesi untuk membuka hubungan diplomatik sangat antusias dan ambisius. Salah satu parameter yang bisa digunakan untuk melihat antusiasme dan ambisiusme Israel tersebut adalah dua kali pertemuan antara Soeharto dan Perdana Menteri Israel waktu itu, Yitzak Rabin di Jakarta pasca kesepakatan oslo tahun 1993. Hal yang

sama juga dilakukan oleh Shimon Peres yang bertemu dengan Soeharto di Jakarta.

Kalau dilihat catatan sejarah era 1993-1997, sikap pemerintah RI terhadap Israel secara garis besar dapat dikatakan kontra-Israel. Hal ini tercermin dari sikap resmi Indonesia yang diwakili oleh institusi kementerian luar negeri RI bahwa hubungan bilateral antara Indonesia-Israel baru dapat dijalin setelah tercapainya perdamaian menyeluruh di Timur Tengah. Pada waktu itu juga Soeharto secara personal maupun dalam kapasitas sebagai presiden RI beberapa kali menegaskan bahwa Jakarta sama sekali belum memikirkan masalah pembukaan hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.⁵⁰

Soal pembukaan hubungan diplomatik RI-Israel muncul ketika Menhankam Edi Sudrajat (pada 10 September 1993) dan Menlu Ali Alatas (13 September 1993) mengatakan bahwa Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara-negara Arab sudah mengambil keputusan itu. Pernyataan itu menyulut reaksi keras dari masyarakat Muslim Indonesia, sebagaimana terlihat dari digelarnya apel anti-Israel di Masjid Al-Azhar (19 September 1993), yang dihadiri sekita 15.000 orang. Kehebohan terjadi lagi ketika muncul berita tentang kedatangan delegasi Israel yang diwakili oleh Dubes Israel di Singapura Megiddo dan Mordechai Ben Ari (Deputi Direktur Jendral Departemen Pariwisata Israel)

⁵⁰ TIM P2P-LIPI, *Minoritas Muslim di Israel: Dimensi Sosial dan Politik*, Jakarta: Pensil 324, ISMES & P2P-LIPI, 2004, hal.134

dalam sidang umum WTO di Denpasar, awal oktober 1993. Sejumlah tokoh dan lembaga-lembaga Islam mengeluarkan reaksi bernada protes terhadap keputusan pemerintah RI yang mengundang delegasi Israel itu.⁵¹ Pada tahun yang sama juga sebuah Koran Israel, Haaretz, memuat berita tentang adanya kunjungan sejumlah pengusaha Israel ke Indonesia dalam upaya menjalin kerja sama dengan pengusaha Indonesia.

Kontroversi hubungan RI-Israel muncul kembali sewaktu lima senator AS berkunjung ke Jakarta (pertengahan januari 1994) dan mendesak RI agar mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hanya sepekan sesudah adanya desakan dari para senator AS itu, pada 22 januari 1994 muncul berita adanya dua perusahaan Israel (Alhit dan BVR) yang berminat membangun pangkalan angkatan udara di Indonesia. Hal ini kemudian dibantah oleh Edi Sudrajat. Pada Februari 1994, Tel Aviv mengundang wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Israel serta mengadakan wawancara dengan Rabin. Dalam wawancara itu Rabin mengatakan harapannya agar hubungan diplomatik RI-Israel supaya segera diwujudkan.⁵²

Pada akhir Oktober 1994, empat tokoh Islam Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid (NU), Habib Chirzin (Muhammadiyah), Djohan Efendi (Departemen Agama) dan Bondan Gunawan (Fordem) berkunjung ke Israel atas undangan

⁵¹ Sihbudi, Riza. *Op.cit*, hal 338

⁵² *Ibid*, hal 338

pemerintah setempat guna menghadiri sebuah seminar tentang perdamaian yang diselenggarakan oleh Institute Harry S.Truman, dan sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian Yordania-Israel yang disponsori Amerika, akhir Oktober 1994. Keempat tokoh Islam Indonesia itu juga dikabarkan sempat mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menlu Israel.⁵³

Sebenarnya jauh sebelum era Soeharto yang secara tegas tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, di era orde lama juga di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dikenal sangat kental resistensinya terhadap Israel bahkan sangat radikal. Secara ideologis, memang Soekarno dikenal sebagai seorang nasionalis radikal. Pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajarannya begitu keras dalam menentang segala bentuk imperialisme termasuk gerakan Yahudi-Zionis-Israel. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, Republik Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan secara terang-terangan Presiden Soekarno mendukung perjuangan bangsa-bangsa Afrika dan Timur Tengah melawan penjajahan imperialisme AS dan gerakan Zionis-Yahudi-Israel atas bangsa Palestina.⁵⁴ Soekarno memang lebih kental menunjukkan sikap anti-Zionisme dibandingkan penggantinya. Dia mengundang Grand Mufti ke konferensi Asia Afrika di Bandung dan melarang Israel (juga Taiwan) untuk ikut Asian Games IV di Jakarta tahun 1962.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hal 339

⁵⁴ Wibowo, M.*Op.Cit* . hal. 26

⁵⁵ *Ibid*, hal. 95

Dinamika isu hubungan Indonesia-Israel yang kontroversial baik di era Soekarno maupun Soeharto sempat mereda pasca runtuhnya rezim Soeharto terutama di era BJ Habibie yang singkat masa jabatannya dan pada masa kepemimpinan Megawati. Masalah kontroversi RI-Israel yang paling heboh adalah di era Gus Dur yang bersamaan dengan *euphoria* reformasi di kalangan masyarakat Indonesia. Pada saat itu, Presiden Gus Dur dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab pernah melontarkan wacana untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, namun ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia terutama kelompok Islam garis keras. Bahkan jauh sebelum menjabat sebagai presiden RI, Gus Dur dalam kapasitas sebagai ketua umum PBNU menjadi figur terdepan dalam melontarkan gagasan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Penolakan terhadap rencana Gus Dur tersebut tidak saja datang dari dalam negeri sendiri, tetapi juga dari negara-negara luar terutama dari Arab.

Di tingkat Parlemen, ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan agar Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Israel dinilai terus melakukan okupasi secara biadab di atas tanah sah bangsa Palestina. Mahfudz Siddik mengatakan: "Selama saya menjadi Ketua Komisi I DPR, akan tetap menjaga supaya Indonesia tidak membangun hubungan dengan Israel," Dia juga mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan peran Palestina dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia ketika mengalami penjajahan dari Belanda. Karena itu, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) ini, sudah sepatutnya bangsa Indonesia terus berupaya mendorong kemerdekaan negara Palestina dari penjajahan Zionis Israel.⁵⁶

Koordinator Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Al Muzzammil Yusuf juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, Indonesia belum bisa segarang Turki terhadap Israel. Satu-satunya bentuk ketegasan Indonesia terhadap Israel adalah tak menjalin hubungan diplomatik. Meskipun demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang diharapkan bangsa Palestina. Sebab, Indonesia dianggap sebagai representasi Muslim moderat. Al-Muzammil Yusuf mengatakan “Kita mendukung demokrasi yang ada di Palestina.”⁵⁷

Di pihak Pemerintah Indonesia, melalui kementerian luar negeri secara tegas dalam sikap politik luar negerinya yang mendukung kemerdekaan Palestina. Terhadap keinginan dari berbagai pihak dari komunitas pro-Israel yang ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel sangat kecil kemungkinannya, bahkan mustahil untuk diwujudkan sebelum kondisi Timur Tengah secara keseluruhan tercapai kesepakatan damai dan lebih khusus lagi kemerdekaan sepenuhnya untuk Palestina. Persoalan sikap politik luar negeri Indonesia terhadap isu-isu yang berkembang di kawasan Timur Tengah tidak lepas dari realitas konflik yang terjadi antara Israel dengan negara-negara tetangganya di dunia Arab khususnya Palestina.

⁵⁶ <http://beritapks.com/mahfudz-siddiq-terus-berupaya-indonesia-israel-tidak-berhubungan-diplomatik/>

⁵⁷ <http://forum.kompas.com/internasional/41153-soal-israel-indonesia-tak-bisa-segarang-turki.html>

Sikap resmi Pemerintah RI terhadap Israel sejak lama tetap sama dan belum berubah. Walaupun sempat ada keinginan dari beberapa pihak untuk berhubungan dengan Israel, namun tetap saja menemui kegagalan. Sampai saat ini, Indonesia secara tegas tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, Indonesia dengan tegas menyatakan tidak mengakui kedaulatan maupun pemerintahan Israel. Sikap politik luar negeri Indonesia tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011, menanggapi isu yang berkembang terkait perayaan hari kemerdekaan Israel oleh sekelompok orang di Indonesia. Dikatakan Tene, sikap Indonesia belum berubah dan tetap akan sama. Tene menegaskan, Indonesia sejak negara Israel berdiri sejak 1948 telah menyatakan menolak kedaulatan dan pemerintahan negara tersebut. Israel dinilai telah melakukan pencaplokan wilayah dan penindasan terhadap warga Palestina. Tene menambahkan, Indonesia mendukung solusi dua negara, yaitu dibentuknya negara Palestina dan Israel secara berdampingan tanpa adanya upaya saling mengambil lahan satu sama lain.⁵⁸

Pemaparan tersebut menunjukkan sikap Pemerintah yang tidak menginginkan dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel. Dimana Indonesia hanya akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel memenuhi tiga syarat: *Pertama*, bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya dengan berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerusalem. Yang *kedua*,

⁵⁸ <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=21939>

seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel, termasuk Dataran Tinggi Golan dikembalikan. Dan *ketiga*, dipulangkannya atau dibebaskannya semua tawanan Palestina oleh Israel.